

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur

2012 - 2017



BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur

2012 - 2017

<https://nhtt.bpt.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENGELUARAN 2012 - 2017**

ISSN : 2407-893X
Nomor Publikasi : 53550.1803
Katalog : 9302004.53

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 64 halaman

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh : © BPS Provinsi NTT Provinsi

Dicetak Oleh : CV. Vilya Latu Abadi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kupang, Juli 2018

Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	1
Daftar Tabel.....	3
Daftar Grafik.....	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	7
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	8
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	11
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	15
2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	16
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).....	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P).....	19
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	22
2.5 Perubahan Inventori (PI).....	24
2.6 Ekspor-Impor.....	26
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGELUARAN 2012-2017.....	29
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran.....	30
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran.....	39
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2012-2017.....	51
4.1 PDRB (Nominal).....	52
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB.....	53
4.3 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB.....	53
4.4 Perbandingan PDRB Terhadap Impor.....	54

4.5	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan.....	55
4.6	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>).....	56
4.7	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR).....	57
BAB V. PENUTUP.....		59
LAMPIRAN.....		61
DAFTAR PUSTAKA.....		69

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	31
Tabel 2. PDRB atas dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	32
Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017	34
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	36
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	37
Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	38
Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	40
Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	41
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	42
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	43
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	44
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	47
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	48
Tabel 14. Perkembangan Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	49
Tabel 15. Perkembangan Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	50
Tabel 16. PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	52
Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	53
Tabel 18. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	54
Tabel 19. Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017...	54

Halaman

Tabel 20.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	55
Tabel 21.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	56
Tabel 22.	Rasio Perubahan Kapital terhadap Output Provinsi Nusa Tenggara Timur (ICOR), 2012 - 2017.....	58

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017	31
Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017	33
Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017.....	33
Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017	35
Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017	36

<https://ntt.bps.go.id>

Pendahuluan

1

Mengetahui **KONDISI EKONOMI** di suatu wilayah/ regional dalam suatu periode

PDRB

Menurut Pendekatan Produksi

Menurut Pendekatan Pendapatan

Menurut Pendekatan Pengeluaran

KOMPONEN

1



Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

2



Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit

3



Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

4



Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

5



Perubahan Inventori

6



Ekspor Neto

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan

cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode *FISIM* (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *International Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 dan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

Metode Estimasi dan Sumber Data

SUMBER DATA PDRB PENGELUARAN



Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Susenas BPS; Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun; Data Sekunder (dari BPS maupun luar BPS; IHK)



Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit

Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit; Hasil Up-Dating Direktori LNPRT; Indeks Harga Konsumen



Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Data Realisasi APBN Tahunan dan APBD Tahunan (Kemenkeu); Statistik Keuangan Daerah (BPS); Output BI (BI); Gaji PNS (kemenkeu); IHK (BPS)



Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Output Industri Konstruksi; Nilai Impor 2 Digit HS; Indeks Produksi Industri Besar Sedang; Laporan Keuangan Perusahaan; Publikasi Statistik Industri Besar Sedang; IHPB; Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian, LGA, Konstruksi; Data Eksplorasi Mineral; Statistik Peternakan



Perubahan Inventori

Laporan Keuangan Perusahaan—Perusahaan; Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD; Data Komoditas Pertambangan; Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang; Data Komoditas Perkebunan; IH Implisit PDRB; IHPB; Data Eksternal Lain



Ekspor Neto

Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang dan Impor Barang; Neraca Pembayaran Indonesia dari BI; Laporan Simopol (Laporan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan); Informasi Lalu—Lintas Barang Yang Keluar—Masuk Provinsi di Jembatan Timbang dan Dari Hasil Survei; Kurs Transaksi Rata—Rata Timbang Dari BI

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS

d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. **Metode Estimasi**

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} &= \text{Output} - \\ &\quad \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ &\quad \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ &\quad \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan

usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan *Supply* : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : $PMTB$ atas dasar harga Konstan (t) = $PMTB$ atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir

perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau

metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume Inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$
$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{\text{IHPB rata-rata (t)}}$$
$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

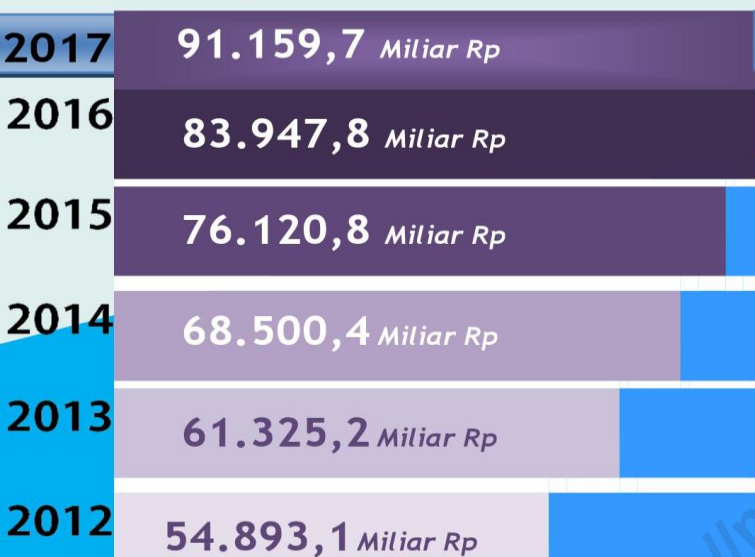
Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

<https://ntt.bps.go.id>

<https://ntt.bps.go.id>

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGELUARAN 2012 - 2017

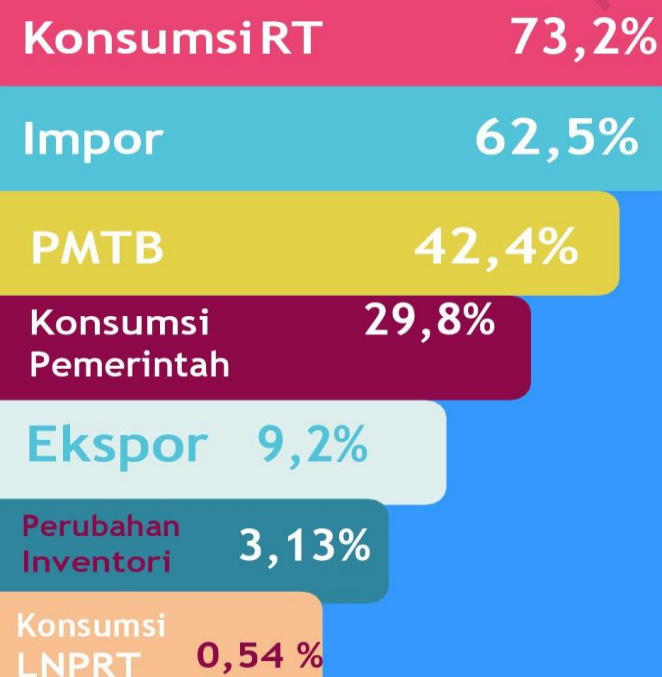
PDRB ADHB



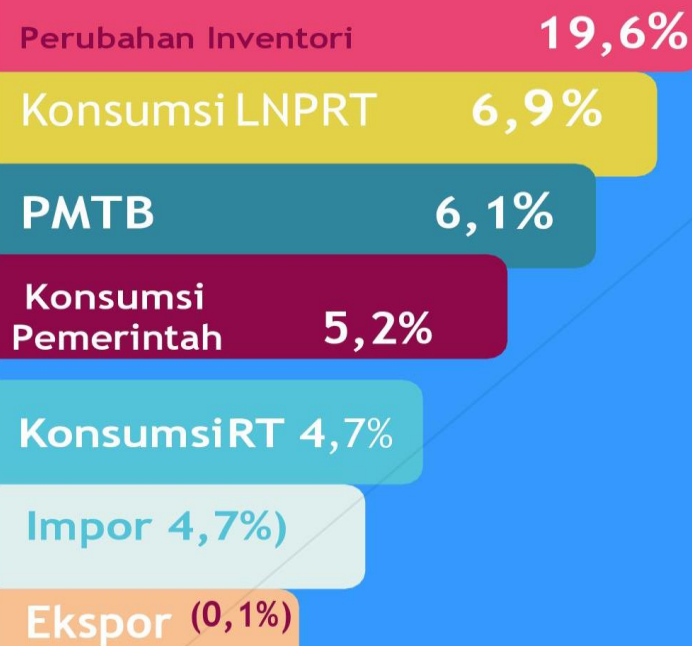
PDRB ADHK



DISTRIBUSI 2017



PERTUMBUHAN 2017



3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar harga (atas dasar harga) berlaku di tahun 2017 sebesar 91.159,7 miliar Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) konstan 2010 maka PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 62.788,1 miliar Rupiah.

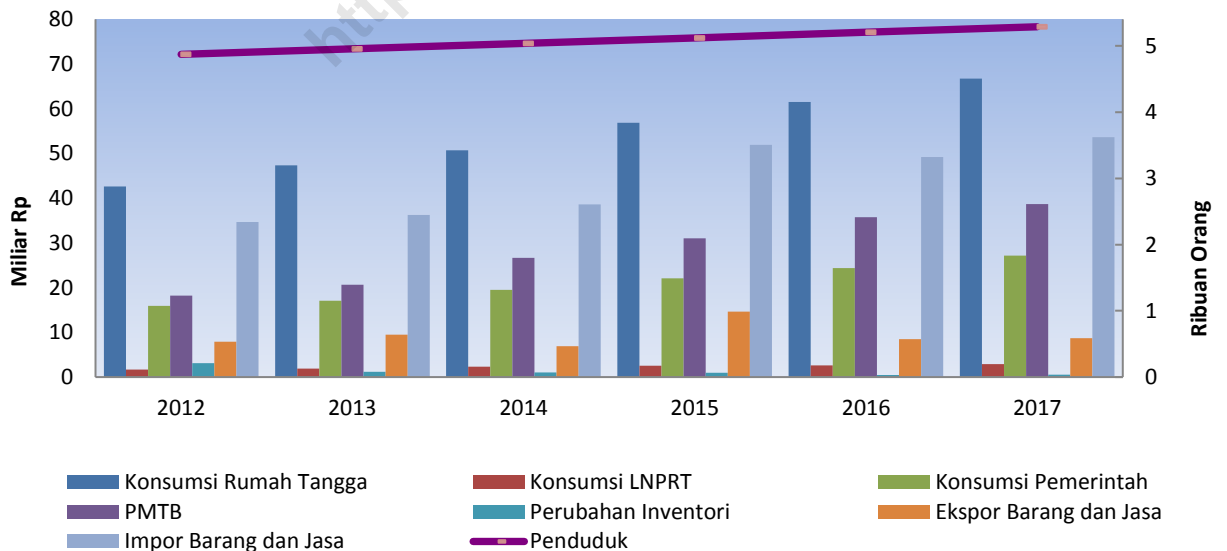
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2012-2017 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 5,5%; 5,4%; 5,1%; 4,9%; 5,2% dan 5,2%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar 13,6%. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2012-2017 PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 54.893,1 miliar Rupiah (2012); 61.325,3 miliar Rupiah (2013); 68.500,4 miliar Rupiah (2014); 76.120,8 miliar Rupiah (2015); 83.947,8 miliar Rupiah (2016); dan 91.159,7 miliar Rupiah (2017). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2012-2017 dapat dilihat dari Tabel 1 dan Grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Table **Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017**
GRDP at Current Price by Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012-2017

(Miliar Rp/ Trillion Rp)						
Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	42 639,9	47 342,1	50 692,5	56 851,5	61 506,3	66 707,5
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	1 646,8	1 868,3	2 323,8	2 539,4	2 636,9	2 920,5
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	15 958,5	17 083,0	19 486,1	22 091,1	24 346,4	27 194,5
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	18 234,0	20 620,3	26 660,3	30 996,1	35 725,0	38 685,6
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	3 134,5	1 164,3	1 024,3	969,1	458,3	571,0
6. Ekspor/ <i>Export</i>	7 933,4	9 506,7	6 930,5	14 632,7	8 465,0	8 716,0
7. Impor/ <i>Import</i>	34 654,0	36 259,5	38 617,0	51 959,1	49 190,2	53 635,4
PDRB / <i>GRDP</i>	54 893,1	61 325,3	68 500,4	76 120,8	83 947,8	91 159,7

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Figure **Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017**
GRDP at Current Price by Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012-2017



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dinilai dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran

tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2012-2017 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Table **Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017**
GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure East Nusa Tenggara Province,
2012-2017

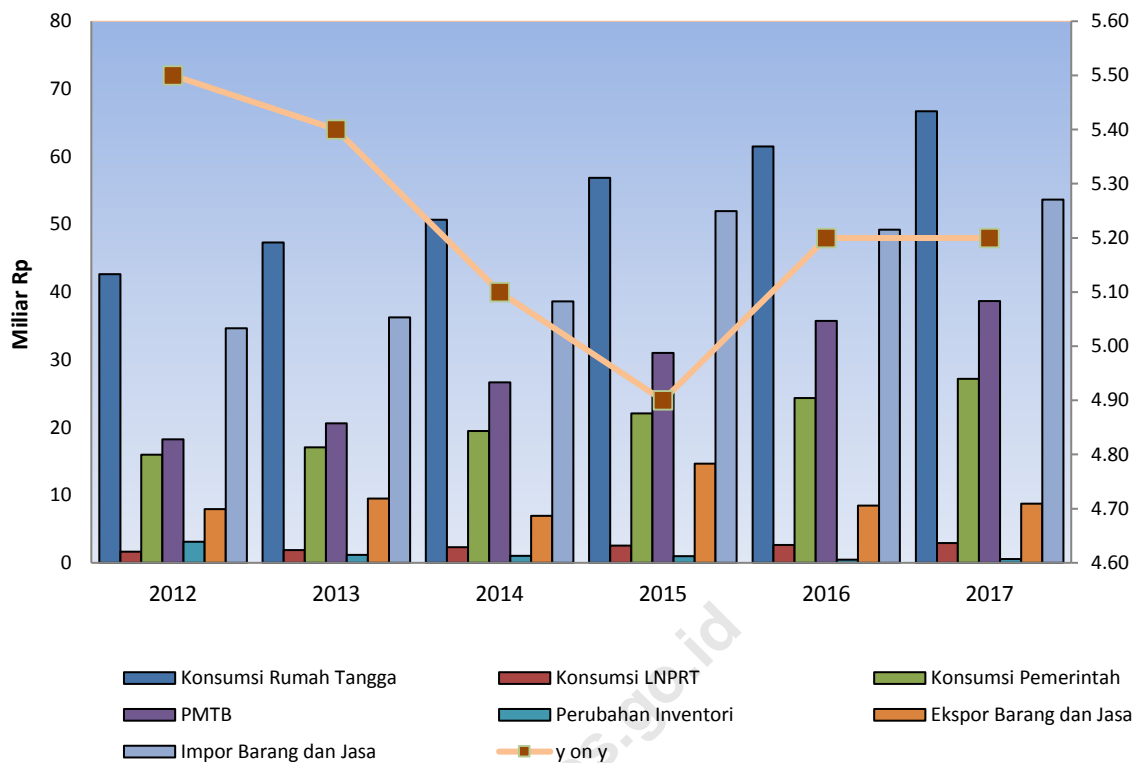
(Miliar Rp/Trillion Rp)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	37 702,4	39 795,2	42 109,4	44 379,1	46 188,4	48 369,6
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	1 613,3	1 709,9	1 961,6	2 049,6	2 057,9	2 199,0
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	13 496,8	15 186,5	15 528,9	16 608,1	16 838,2	17 721,1
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	15 844,4	17 614,8	22 196,0	24 832,3	26 088,1	27 666,2
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	2 795,4	979,3	794,5	673,5	297,7	356,2
6. Ekspor/ <i>Export</i>	4 579,9	4 708,9	5 347,4	10 490,5	5 746,0	5 742,5
7. Impor/ <i>Import</i>	27 168,9	28 489,4	33 829,8	42 262,4	37 511,1	39 266,5
PDRB / <i>GRDP</i>	48 863,2	51 505,2	54 108,0	56 770,8	59 705,3	62 788,1

Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat, yakni sebesar 48.863,2 miliar Rupiah (2012); 51.505,2 miliar Rupiah (2013); 54.108,0 miliar Rupiah (2014); 56.770,8 miliar Rupiah (2015); 59.705,3 miliar Rupiah (2016); dan 62.788,1 miliar Rupiah (2017). Sedangkan dari Grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung melambat, yakni dari 5,5 persen pada tahun 2012 menjadi 5,2 persen pada tahun 2017.

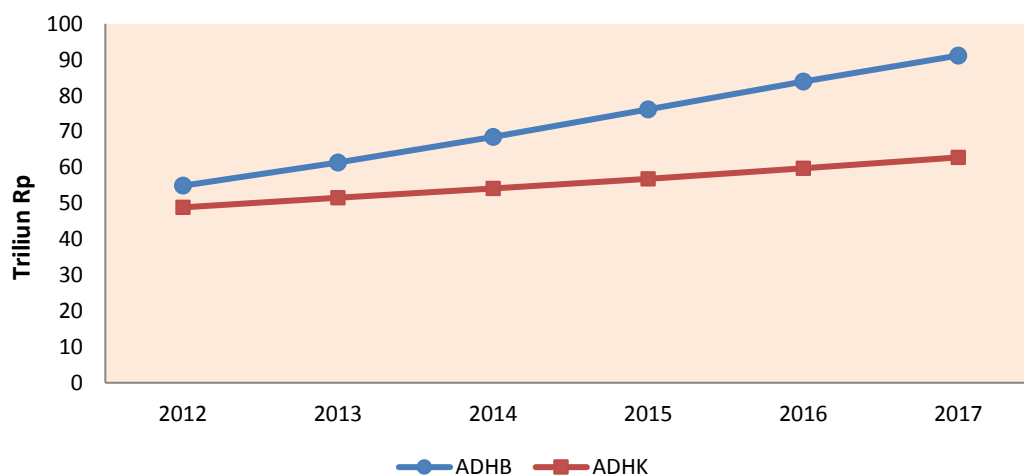
Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Figure

GRDP at 2010 Constant by Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012-2017



Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012-2017
Figure

Comparing of GRDP at Current Price and GRDP at Constant Price 2010 East Nusa Tenggara Province, 2012-2017



Dari Grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang

cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

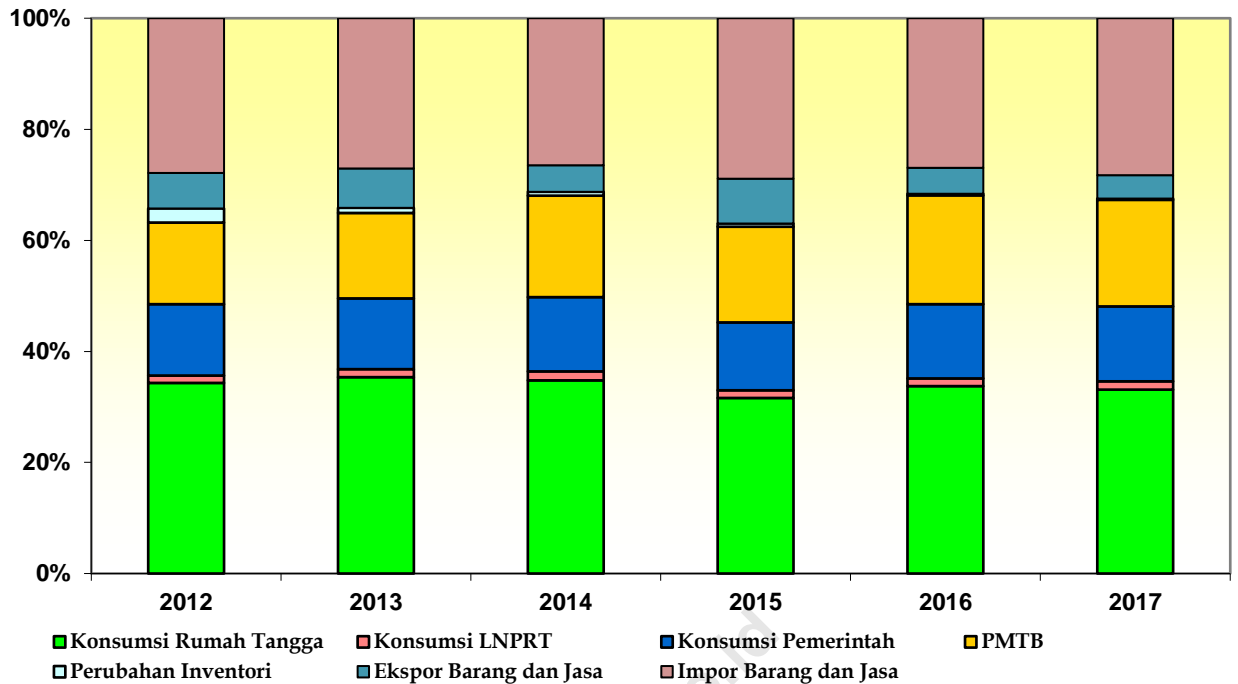
Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Table Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure
East Nusa Tenggara Province, 2012-2017

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(%)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household</i> <i>Consumption</i>	77,7	77,2	74,0	74,7	73,3	73,2
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH</i> <i>Consumption</i>	3,0	3,1	3,4	3,3	3,1	3,2
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government</i> <i>Consumption</i>	29,1	27,9	28,5	29,0	29,0	29,8
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital</i> <i>Formation</i>	33,2	33,6	38,9	40,7	42,6	42,4
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of</i> <i>Inventory</i>	5,7	1,9	1,5	1,3	0,6	0,6
6. Ekspor/ <i>Export</i>	14,5	15,5	10,1	19,2	10,1	9,2
7. Impor/ <i>Import</i>	63,1	59,1	56,4	68,3	58,6	62,5
PDRB / <i>GRDP</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2012-2017, PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 33,2 s.d 42,6 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 9,2 s.d 19,2 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 56,4 s.d 68,3 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Figure Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012-2017



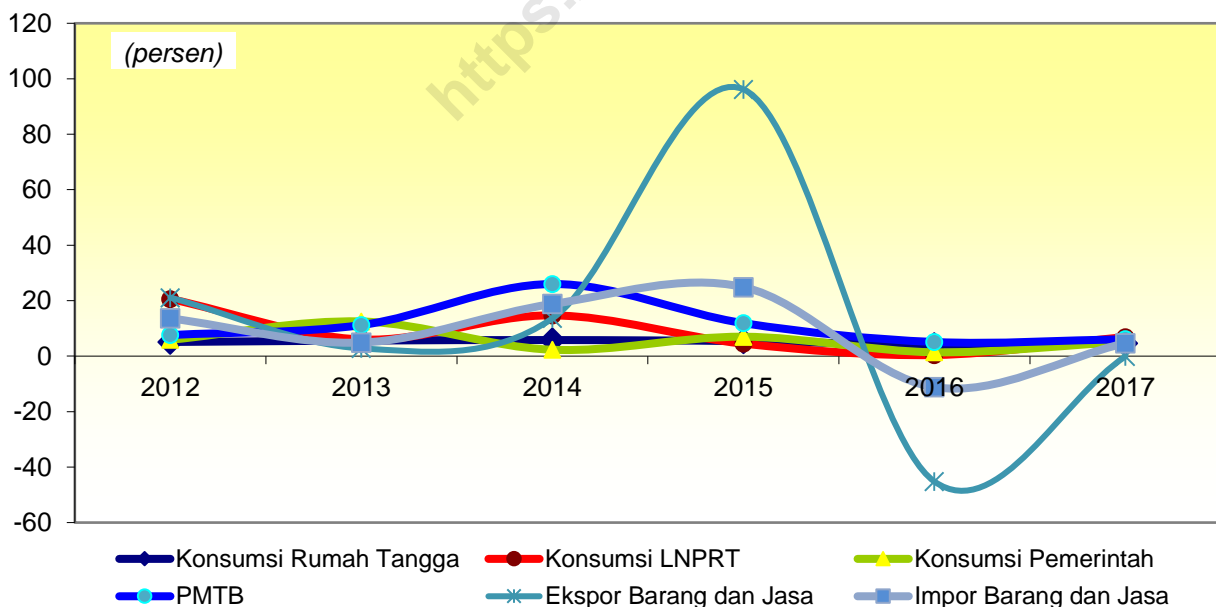
Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 27,9–29,8 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB cenderung besar. Di sisi lain, pada tahun 2012-2017 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “defisit” atau merugi.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2012 - 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perlambatan, yakni sebesar 5,5 persen (2012); 5,4 persen (2013); 5,1 persen (2014); 4,9 persen (2015); 5,2 persen (2016); dan 5,2 persen (2017). Sedangkan dari Grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Table Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012-2017

Komponen Pengeluaran/ Expenditure item	(%)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption	5,1	5,6	5,8	5,4	4,1	4,7
2. Konsumsi LNPRT/NPISH Consumption	20,6	6,0	14,7	4,5	0,4	6,9
3. Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption	5,9	12,5	2,3	7,0	1,4	5,2
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	7,6	11,2	26,0	11,9	5,1	6,1
5. Perubahan Inventori/ Changes of Inventory	56,7	(65,0)	(18,9)	(15,2)	(55,8)	19,6
6. Ekspor/ Export	21,1	2,8	13,6	96,2	(45,2)	(0,1)
7. Impor/ Import	13,6	4,9	18,8	24,9	(11,2)	4,7
PDRB / GRDP	5,5	5,4	5,1	4,9	5,2	5,2

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Figure Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012-2017



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik

⁶ Indeks perkembangan

yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2012-2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Table **2012 - 2017**
Implicit Indices of GRDP by Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012-2017

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	113,1	119,0	120,4	128,1	133,2	137,9
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	102,1	109,3	118,5	123,9	128,1	132,8
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	118,2	112,5	125,5	133,0	144,6	153,5
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	115,1	117,1	120,1	124,8	136,9	139,8
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	112,1	118,9	128,9	143,9	154,0	160,3
6. Ekspor/ <i>Export</i>	173,2	201,9	129,6	139,5	147,3	151,8
7. Impor/ <i>Import</i>	127,6	127,3	114,2	122,9	131,1	136,6
PDRB / <i>GRDP</i>	112,3	119,1	126,6	134,1	140,6	145,2

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Table Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012-2017
Source of Growth of GRDP by Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012-2017

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	3,9	4,3	4,5	4,2	3,2	3,6
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	0,6	0,2	0,5	0,2	0,0	0,2
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1,6	3,5	0,7	2,0	0,4	1,5
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2,4	3,6	8,9	4,9	2,2	2,6
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	2,2	(3,7)	(0,4)	(0,2)	(0,7)	(0,1)
6. Ekspor/ <i>Export</i>	1,7	0,3	1,2	9,5	(8,4)	(0,0)
7. Impor/ <i>Import</i>	7,0	2,7	10,4	15,6	(8,4)	2,9
PDRB / <i>GRDP</i>	5,5	5,4	5,0	4,9	5,2	5,2

Sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran memberikan informasi berapa kontribusi setiap komponen terhadap total pertumbuhan ekonomi, dimana selama kurun waktu 2012-2017 kontribusi masing-masing komponen berfluktuasi. PK-RT menjadi komponen terpenting yang memberi kontribusi sebesar 3,9 persen pada tahun 2012 dan 3,6 persen pada tahun 2017. Komponen terpenting kedua adalah PMTB yang memberi kontribusi sebesar 2,4 persen pada tahun 2012 dan 2,6 persen pada tahun 2017. PK-P menjadi komponen terpenting ketiga yang memberikan kontribusi antara 0,4 persen s.d. 3,5 persen selama kurun waktu 2012-2017.

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2012–2017.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok *COICOP* (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012–2017 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Table **Trend of Using on Final Household Consumption of East Nusa Tenggara Province, 2012 – 2017**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi rumah Tangga/ <i>Total of Household Consumption</i>						
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Miliar Rp/Trillion Rp)	42 639,9	47 342,1	50 692,5	56 851,5	61 506,3	66 707,5
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i> (Miliar Rp/Trillion Rp)	37 702,4	39 795,2	42 109,4	44 379,1	46 188,4	48 369,6
Proporsi terhadap PDRB/ <i>Proportion to GRDP</i> (% ADHB / <i>Current Prices</i>)	77,7	77,2	74,0	74,7	73,3	73,2
Rata-rata konsumsi per-Kapita/ <i>Average of per-capita consumption</i> (Ribu Rp/Thousand Rp)						
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Miliar Rp/Trillion Rp)	8 753,4	9 556,4	10 064,2	11 103,7	11 820,1	12 616,6
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i> (Miliar Rp/Trillion Rp)	7 739,8	8 033,0	8 360,2	8 667,7	8 876,4	9 148,3
Pertumbuhan/ <i>Growth</i> ⁷						
a. Total konsumsi RT/ <i>Total of Household Consumption</i>	5,1	5,6	5,8	5,4	4,1	4,7
b. Perkapita/ <i>Per capita</i>	3,3	3,8	4,1	3,7	2,4	3,1
Jumlah penduduk/ <i>Number of population</i> (000 orang/person)	4 871,2	4 954,0	5 036,9	5 120,1	5 203,5	5 287,3

Selama periode 2012-2017, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuatif, yaitu 77,7 persen (2012); 77,2 persen (2013); 74,0 persen (2014); 74,7 persen (2015); 73,3 persen (2016); dan 73,2 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 77,7 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 73,2 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2012 harga barang konsumsi rumah tangga masih rendah.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga per kapita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2012, setiap rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur menghabiskan dana sekitar 8.753,4

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

ribu Rupiah setahun per orang untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 9.556,4 ribu Rupiah (2013); 10.064,2 ribu Rupiah (2014); 11.103,7 ribu Rupiah (2015); 11.820,1 ribu Rupiah (2016); dan 12.616,6 ribu Rupiah (2017). Sementara itu, atas dasar harga konstan 2010, rata-rata konsumsi per kapita tumbuh pada kisaran 2 s.d. 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 4,1 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 2,4 s.d 4,1 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Table 2012 - 2017
Structure of Household Final Consumption Expenditure
East Nusa Tenggara Province, 2012-2017

Kelompok Konsumsi/ <i>Consumption group</i>	(%)					
	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	45,0	42,5	40,9	41,8	44,5	44,6
b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and footwear</i>	4,4	4,4	4,3	4,8	4,7	4,7
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	17,7	17,9	18,5	17,5	15,8	15,9
d. Kesehatan & Pendidikan/ <i>Health and education</i>	6,8	7,0	7,4	7,1	7,3	7,2
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	21,0	23,1	23,4	22,4	21,0	20,3
f. Hotel & Restoran/ <i>Hotels, and restaurants</i>	2,6	2,4	2,8	3,4	3,8	4,2
g. Lainnya/ <i>Miscellaneous goods and services</i>	2,6	2,8	2,8	3,0	3,1	3,1
Total Konsumsi / <i>Total of consumption</i>	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2012, pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 5,1 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 5,6 persen (2013); 5,8 persen (2014); 5,4 persen (2015); 4,1 persen (2016); dan 4,7 persen (2017). Sementara itu pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita pada masing-

masing tahun adalah 3,3 persen (2012); 3,8 persen (2013); 4,1 persen (2014); 3,7 persen (2015); 2,4 persen (2016) dan 3,1 persen (2017). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumahtangga lebih tinggi daripada peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 1,6 s.d. 1,7 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 6,4 persen, pada harga kelompok hotel dan restoran. Hal ini diakibatkan oleh adanya kenaikan harga makanan jadi.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017⁸
Table **Implicit Growth (Price Indices) of Household Final Consumption Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012 – 2017⁹**

Kelompok Konsumsi/ <i>Consumption group</i>	(%)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	8,5	3,7	2,1	8,2	9,3	2,9
b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and footwear</i>	3,8	6,4	(3,4)	17,4	1,3	4,0
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	2,1	3,6	2,5	1,5	(1,0)	6,4
d. Kesehatan & Pendidikan/ <i>Health and education</i>	5,0	6,2	(1,7)	5,1	4,1	2,6
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	3,8	8,1	2,3	2,3	(4,2)	0,6
f. Hotel & Restoran/ <i>Hotels, and restaurants</i>	0,8	6,3	12,4	24,8	14,9	11,7
g. Lainnya/ <i>Miscellaneous goods and services</i>	15,0	17,0	(21,5)	13,6	5,2	7,1
Total Konsumsi / <i>Total of consumption</i>	5,8	5,2	1,2	6,4	4,0	3,6

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Trend of NPISH Final Consumption Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012 - 2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi LNPRT						
a. ADHB (Miliar Rp)	1 646,8	1 868,3	2 323,8	2 539,4	2 636,9	2 920,5
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1 613,3	1 709,9	1 961,6	2 049,6	2 057,9	2 199,0
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	3,0	3,1	3,4	3,3	3,1	3,2
Pertumbuhan (ADHK 2010)	20,6	6,0	14,7	4,5	0,4	6,9

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2012-2017 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2012, konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 1.646,8 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 1.868,3 miliar rupiah (2013), 2.323,8 miliar rupiah (2014), 2.539,4 miliar rupiah (2015), 2.636,9 miliar rupiah (2016) dan 2.920,5 miliar rupiah (2017). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 20,6 persen (2012), 6,0 persen (2013), 14,7 persen (2014), 4,5 persen (2015), 0,4 persen (2016), dan 6,9 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 karena adanya kegiatan kampanye dan persiapan menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2013.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan

konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Trend of Government Final Consumption Expenditure East Nusa Tenggara Province, 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi Pemerintah						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	15 958,5	17 083,0	19 486,1	22 091,0	24 346,4	27 194,4
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	13 496,8	15 186,5	15 528,9	16 608,1	16 838,2	17 721,1
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	29,1	27,9	28,5	29,0	29,0	29,8
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)						
a. ADHB	3 276,1	3 448,3	3 868,7	4 314,6	4 678,8	5 143,4
b. ADHK 2010	2 770,7	3 065,5	3 083,0	3 243,7	3 235,9	3 351,6
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)						
a. ADHB	127 948,7	137 944,2	155 738,2	191 228,4	192 661,2	217 915,0
b. ADHK 2010	108 211,6	122 630,0	124 111,2	143 765,7	133 246,5	142 002,8
Pertumbuhan ¹⁰						
a. Total konsumsi pemerintah	5,9	12,5	2,3	7,0	1,4	5,2
b. Konsumsi perkapita	4,1	10,6	0,6	5,2	(0,2)	3,6
c. Konsumsi per-pegawai pemerintah	8,4	13,3	1,2	15,8	(7,3)	6,6
Jumlah Pegawai Pemerintah ¹¹	124 726	123 840	125 121	115 522	126 369	124 794
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	4 871,2	4 954,0	5 036,9	5 120,1	5 203,5	5 287,3

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2012, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 15.958,5 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 17.083,0 miliar rupiah (2013), 19.486,1 miliar rupiah (2014), 22.091,0 miliar rupiah (2015), 24.346,4 miliar rupiah (2016) dan 27.194,4 miliar rupiah (2017). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari 29,1 persen (tahun 2012) hingga mencapai 29,8 persen

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

¹¹ Tidak termasuk polisi dan militer

(tahun 2017). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 27,9 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya penerimaan calon pegawai negeri sipil pada beberapa kementerian/lembaga.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2012, konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 3.276,1 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 3.448,3 ribu rupiah (2013); 3.868,7 ribu rupiah (2014); 4.314,6 ribu rupiah (2015); 4.678,8 ribu rupiah (2016) dan mencapai 5.143,4 ribu rupiah pada tahun 2017.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 2.770,7 ribu rupiah (2012); 3.065,5 ribu rupiah (2013); 3.083,0 ribu rupiah (2014); 3.243,7 ribu rupiah (2015); 3.235,9 ribu rupiah (2016) dan 3.351,6 ribu rupiah (2017). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,1 persen (2012) menjadi 10,6 persen (2013). Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita yaitu 0,6 persen (2014); 5,2 persen (2015); (0,2) persen (2016) dan 3,6 persen (2017).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2012, konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 127.948,7 ribu rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 137.944,2 ribu rupiah (2013); 155.738,2 ribu rupiah (2014); 191.228,4 ribu rupiah (2015); 192.661,2 ribu rupiah (2016) dan 217.915,0 ribu rupiah (2017).

Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan kecenderungan peningkatan. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013 dan 2015, masing-masing sebesar 13,3 persen dan 15,8 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010), tidak sejalan juga dengan jumlah pegawai pemerintah yang berfluktuasi. Pada periode tahun 2012 s.d 2017, jumlah pegawai pemerintah

berfluktuasi dengan jumlah pada masing-masing tahun sebesar 124.726 orang (2012); 123.840 orang (2013); 125.121 orang (2014); 115.522 orang (2015); 126.369 orang (2016); dan 124.794 orang (2017).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2015, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 12,5 persen dan 7,0 persen; untuk konsumsi per kapita 10,6 persen dan 5,2 persen; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2015 yaitu 13,3 persen dan 15,8 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2012–2017 berfluktuasi dari 7,6 persen (2012) menjadi 6,1 persen (2017), sementara di tahun lainnya masing-masing 11,2 persen (2013); 26,0 persen (2014); 11,9 persen (2015); dan 5,1 persen (2016). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2014, hal ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur secara besar-besaran.

¹² Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Table *Trend and Structure of GFCF East Nusa Tenggara Province, 2012 - 2017*

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total PMTB						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	18 234,0	20 620,3	26 660,3	30 996,0	35 725,0	38 685,6
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	15 844,4	17 614,8	22 196,0	24 832,3	26 088,1	27 666,2
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	33,2	33,6	38,9	40,7	42,6	42,4
Struktur PMTB ¹³						
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>) (%)	74,6	70,7	75,2	77,7	79,8	83,9
b. Non Bangunan (<i>Mil Rp</i>) (%)	25,4	29,3	24,8	22,3	20,2	16,2
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>) (%)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(100,0)
Pertumbuhan ¹⁴ (%)						
a. Bangunan	8,3	5,0	35,7	15,9	11,9	11,1
b. Non Bangunan	5,7	28,7	3,6	(0,2)	(19,2)	(18,6)
Total PMTB	7,6	11,2	26,0	11,9	5,1	6,1

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Table Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Trend and Structure of Changes in Inventories East Nusa Tenggara Province,
2012 – 2017**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Inventori						
a. ADHB (Miliar Rp)	3 134,5	1 164,3	1 024,3	969,1	458,3	571,0
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2 795,4	979,3	794,5	673,5	297,7	356,2
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	5,7	1,9	1,5	1,3	0,6	0,6

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2012, perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 3.134,5 miliar rupiah, yang kemudian menurun pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 1.164,3 miliar rupiah dan 1.024,3 miliar rupiah. Pada tahun 2015, perubahan inventori mencapai 969,1 miliar rupiah, tahun 2016 kembali mencapai 458,3 miliar rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 571,0 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan. Pada tahun 2012, proporsi perubahan inventori adalah 5,7 persen, selanjutnya 1,9 persen (2013), 1,5 persen (2014), 1,3 persen (2015), 0,6 persen (2016), dan 0,6 persen (2017). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah ternak pada tahun 2012.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 14. Perkembangan Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Table Trend of Export East Nusa Tenggara Province, 2012 – 2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Ekspor						
a. ADHB (Miliar Rp)	7 933,4	9 506,7	6 930,5	14 632,7	8 465,0	8 716,0
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4 579,9	4 708,9	5 347,4	10 490,5	5 746,0	5 742,5
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	14,5	15,5	10,1	19,2	10,1	9,2
Pertumbuhan ¹⁵	21,1	2,8	13,6	96,2	(45,2)	(0,1)

Secara total, dalam kurun waktu 2012-2017 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2012, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku sebesar 7.933,4 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 9.506,7 miliar rupiah pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014-2017 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 6.930,5 miliar rupiah; 14.632,7 miliar rupiah; 8.465,0 miliar rupiah dan 8.716,0 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung berfluktuasi dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 4.579,9 miliar rupiah (2012); 4.708,9 miliar rupiah (2013); 5.347,4 miliar rupiah (2014); 10.490,5 miliar rupiah (2015); 5.746,0 miliar rupiah (2016); dan 5.742,5 miliar rupiah (2017). Sementara itu, pada periode 2012 s.d 2017, proporsi dalam PDRB berfluktuasi dari 14,5 persen pada tahun 2012 menjadi 9,2 persen di tahun 2017.

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang cukup tinggi pada tahun 2015, yaitu 96,2 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya kenaikan ekspor pada komoditas garam, belerang, kapur, komoditas besi dan baja, dan komoditas mesin-mesin atau pesawat mekanik. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 21,1 persen (2012); 2,8 persen (2013); 13,6 persen(2014); (45,2) persen (2016); dan (0,1) persen(2017).

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Provinsi Nusa Tenggara Timur di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2012 s.d 2017. Pada tahun 2012, nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 34.654,0 miliar rupiah, kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi 36.259,5 miliar rupiah, 38.617,0 miliar rupiah pada tahun 2014, 51.959,1 miliar rupiah pada tahun 2015, menurun menjadi 49.190,2 miliar rupiah pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 53.635,4 miliar rupiah pada tahun 2017. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2012, impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 63,1 persen. Pada tahun berikutnya, kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi 59,1 persen dan 56,4 persen pada tahun 2013 dan tahun 2014. Selanjutnya, pada tahun 2015-2017, proporsi impor barang dan jasa sebesar 68,3 persen, 58,6 persen dan 62,5 persen.

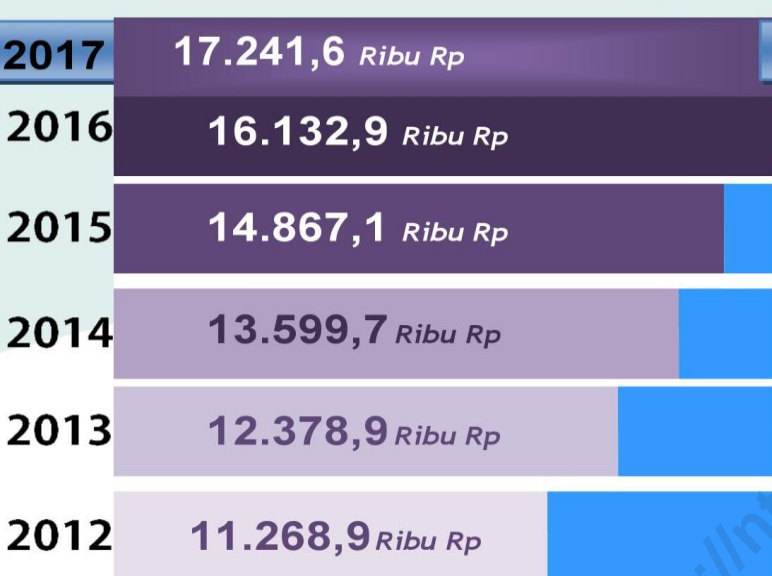
Tabel 15. Perkembangan Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Table Trend of Import East Nusa Tenggara Province, 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Impor						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	34 654,0	36 259,5	38 617,0	51 959,1	49 190,2	53 635,4
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	27 168,9	28 489,4	33 829,8	42 262,4	37 511,1	39 266,5
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	63,1	59,1	56,4	68,3	58,6	62,5
Pertumbuhan ¹⁶	13,6	4,9	18,8	24,9	(11,2)	4,7

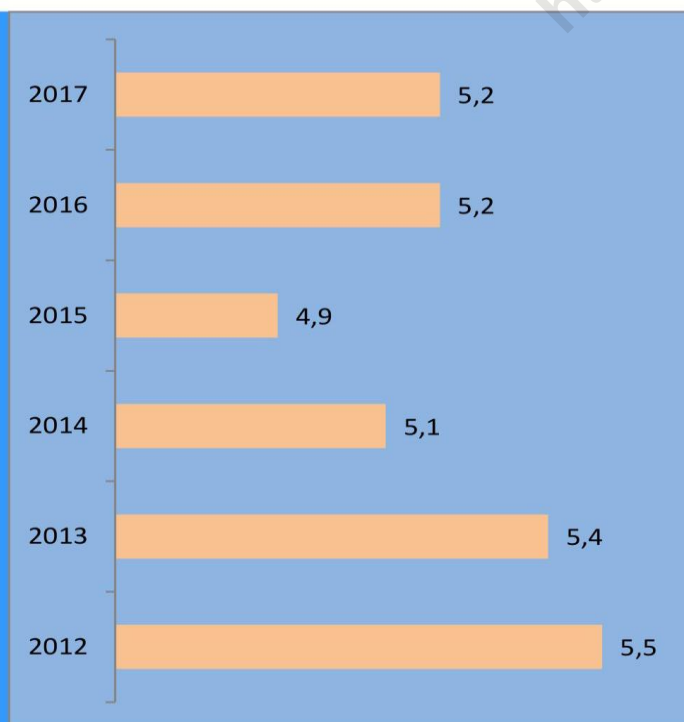
¹⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2012 - 2017

PDRB PERKAPITA ADHB



Pertumbuhan



PDRB PERKAPITA ADHK



Pertumbuhan Perkapita



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Provinsi NTT di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

Tabel 16. PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Table Gross Domestic Regional Bruto and per capita GRD
East Nusa Tenggara Province, 2012 – 2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai PDRB (Miliar Rp)						
- ADHB	54 893,1	61 325,3	68 500,4	76 120,8	83 947,8	91 159,7
- ADHK 2010	48 863,2	51 505,2	54 108,0	56 770,8	59 705,3	62 788,1
PDRB perkapita (Ribu Rp)						
- ADHB	11 268,9	12 378,9	13 599,7	14 867,1	16 132,9	17 241,6
- ADHK 2010	10 031,0	10 396,7	10 873,9	11 661,0	11 474,1	11 875,5
Pertumbuhan						
PDRB perkapita ADHK 2010	3,7	3,7	4,6	7,2	(1,6)	3,5
Jumlah penduduk (000 org)						
Pertumbuhan	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6

Secara umum PDRB per kapita Provinsi NTT menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk NTT rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 – 2017
Total Proportion of Final Consumption Expenditure to GRDP East Nusa Tenggara Province, 2012 – 2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Akhir (ADHB)						
(Miliar Rp)						
a. Rumah tangga	42 639,9	47 342,1	50 692,5	56 851,5	61 506,3	66 707,5
b. LNPRT	1 646,8	1 868,3	2 323,8	2 539,4	2 636,9	2 920,5
c. Pemerintah	15 958,5	17 083,0	19 486,1	22 091,1	24 346,4	27 194,5
Jumlah	60 245,2	66 293,4	72 502,3	81 482,0	88 489,7	96 822,5
PDRB (ADHB)						
(Miliar Rp)	54 893,1	61 325,3	68 500,4	76 120,8	83 947,8	91 159,7
Proporsi	109,8	108,1	105,8	107,0	105,4	106,2

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 100 persen). Dalam hal ini, kebutuhan konsumsi akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah cenderung lebih besar daripada produk yang dihasilkan oleh domestik sehingga untuk memenuhi konsumsi akhir tersebut diperlukan produk yang berasal dari impor.

4.3 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor, kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain, sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 18. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017

Ratio of Export to GRDP East Nusa Tenggara Province, 2012 - 2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	7 933,4	9 506,7	6 930,5	14 632,7	8 465,0	8 716,0
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	18 234,0	20 620,3	26 660,3	30 996,0	35 725,0	38 685,6
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,4	0,5	0,3	0,5	0,2	0,2

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama periode 2012-2017, nilai ekspor lebih rendah daripada nilai PMTB (Tabel 18). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang didalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut diantaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.4 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu, data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi dan sebaliknya.

Tabel 19. Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017

Ratio of Import to GRDP East Nusa Tenggara Province, 2012 - 2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	54 893,1	61 325,3	68 500,4	76 120,8	83 947,8	91 159,7
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	34 654,0	36 259,5	38 617,0	51 959,1	49 190,2	53 635,4
Rasio PDRB terhadap Impor	1,6	1,7	1,8	1,5	1,7	1,7

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor periode 2012-2017 berfluktuasi dari 1,6 (2012) menjadi 1,7 (2013), kemudian pada tahun 2014 rasionya meningkat menjadi 1,8 kemudian menurun menjadi 1,5 di tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017, rasio PDRB terhadap impor kembali meningkat menjadi 1,7.

4.5 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari Tabel 20, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah, dengan rentang 36 sampai dengan 40 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 59 persen ke atas dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 89.547,1 miliar rupiah (2012) menjadi sebesar 144.795,2 miliar rupiah (2017).

Tabel 20. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Table **Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017**
Balancing Side of Supply and Demand East Nusa Tenggara Province,
2012 - 2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Penyediaan						
PDRB (ADHB)	54 893,1	61 325,3	68 500,4	76 120,8	83 947,8	91 159,7
(Miliar Rp)	63,3	63,4	64,0	59,4	63,1	63,0
%						
Total nilai Impor ADHB	34 654,0	36 259,5	38 617,0	51 959,1	49 190,2	53 635,4
(Miliar Rp)	38,7	36,6	36,1	40,6	37,0	37,0
%						
Total Permintaan Akhir¹⁷	89 547,1	97 584,7	107 117,5	128 079,9	133 138,0	144 795,2
(Miliar Rp)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
%						

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 54.893,1 miliar rupiah (2012); 61.325,3 miliar rupiah (2013); 68.500,4 miliar rupiah (2014); 76.120,8 miliar rupiah (2015); 83.947,8 miliar rupiah (2016) dan 91.159,7 miliar rupiah (2017). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 34.654,0 miliar rupiah (2012); 36.259,5 miliar rupiah (2013); 38.617,0 miliar rupiah (2014); 51.959,1 miliar rupiah (2015); 49.190,2 miliar rupiah (2016) dan 53.635,4 miliar rupiah (2017).

¹⁷ Termasuk diskrepansi statistik

4.6 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah diantaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 21. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012 - 2017
Table
Balancing Sheet of Goods and Service Trade East Nusa Tenggara Province, 2012 - 2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	7 933,4	9 506,7	6 930,5	14 632,7	8 465,0	8 716,0
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	34 654,0	36 259,5	38 617,0	51 959,1	49 190,2	53 635,4
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	(26 720,6)	(26 752,8)	(31 686,6)	(37 326,4)	(40 725,2)	(44 919,4)
Rasio ekspor terhadap Impor	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama periode 2012-2017, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi NTT dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi NTT masih dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih besar daripada impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**tabungan luar negeri**”. Defisit perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terjadi antara tahun 2012 sampai dengan 2017 tercatat masing-masing sebesar (26.720,6) miliar rupiah (2012);

(26.752,8) miliar rupiah (2013); (31.686,6) miliar rupiah (2014); (37.326,4) miliar rupiah (2015); (40.725,2) miliar rupiah (2016) dan (44.919,4) miliar rupiah (2017).

Sementara rasio ekspor terhadap impor dari tahun 2012–2017 sebesar 0,2 ke atas. Pada tahun 2012, rasionya sebesar 0,2, kemudian berfluktuasi hingga sebesar 0,2 pada tahun 2017.

4.7 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 22. Rasio Perubahan Kapital terhadap Output Provinsi Nusa Tenggara Timur (ICOR), 2012 - 2017
Incremental Capital Output Ratio East Nusa Tenggara Province, 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	48 863,2	51 505,2	54 108,0	56 770,8	59 705,3	62 788,1
Perubahan (miliar rupiah)	2 529,1	2 642,0	2 602,8	2 662,8	2 934,5	3 082,8
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	15 844,4	17 614,8	22 196,0	24 832,3	26 088,1	27 666,2
ICOR	6,3	6,7	8,5	9,3	8,9	9,0

Data di atas menunjukkan bahwa besaran ICOR periode 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan dari sebesar 6,3 (2012) menjadi 9,0 (2017). Nilai ICOR sebesar 9,0 pada tahun 2017 menunjukkan bahwa untuk menaikkan output perekonomian sebesar satu rupiah dibutuhkan tambahan investasi senilai 9,0 rupiah.

<https://ntt.bps.go.id>

Penutup 5

MANFAAT PDRB
MENURUT
PENGELUARAN



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2012 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2012 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap ekonomi luar daerah.

Lampiran



<https://ntt.bps.go.id>
<http://ntt.bps.go.id>

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2012 - 2017**

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016^x	2017^{xx}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	42 639,9	47 342,1	50 692,5	56 851,5	61 506,3	66 707,5
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	19 206,2	20 136,4	20 754,7	23 770,8	27 349,8	29 747,1
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1 881,5	2 088,3	2 182,4	2 742,2	2 862,1	3 125,8
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7 530,3	8 473,3	9 353,0	9 936,2	9 695,4	10 615,5
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2 888,2	3 291,5	3 732,5	4 039,3	4 470,8	4 834,6
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8 949,1	10 922,8	11 848,6	12 717,0	12 888,2	13 533,2
1.f. Hotel dan Restoran	1 090,8	1 114,7	1 422,1	1 918,0	2 362,8	2 808,3
1.g. Lainnya	1 093,8	1 315,1	1 399,3	1 728,0	1 877,2	2 043,1
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1 646,8	1 868,3	2 323,8	2 539,4	2 636,9	2 920,5
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	15 958,5	17 083,0	19 486,1	22 091,1	24 346,4	27 194,5
3.a. Konsumsi Kolektif	9 354,2	10 242,1	10 980,9	11 921,9	14 851,1	16 152,4
3.b. Konsumsi Individu	6 604,4	6 840,9	8 505,3	10 169,2	9 495,3	11 042,1
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	18 234,0	20 620,3	26 660,3	30 996,1	35 725,0	38 685,6
4.a. Bangunan	13 607,3	14 581,9	20 049,4	24 089,5	28 518,1	32 436,4
4.b. Non-Bangunan	4 626,7	6 038,5	6 610,9	6 906,5	7 206,9	6 249,2
5. Perubahan Inventori	3 134,5	1 164,3	1 024,3	969,1	458,3	571,0
6. Ekspor	7 933,4	9 506,7	6 930,5	14 632,7	8 465,0	8 716,0
7. Impor	34 654,0	36 259,5	38 617,0	51 959,1	49 190,2	53 635,4
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	54 893,1	61 325,3	68 500,4	76 120,8	83 947,8	91 159,7

^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2012 - 2017**

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016^x	2017^{xx}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	37 702,4	39 795,2	42 109,4	44 379,1	46 188,4	48 369,6
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	16 454,5	16 633,0	16 797,4	17 783,5	18 713,9	19 775,6
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1 486,4	1 550,5	1 676,8	1 795,1	1 849,2	1 942,0
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6 977,3	7 578,7	8 163,0	8 542,5	8 421,3	8 666,2
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2 442,1	2 621,8	3 025,7	3 116,7	3 314,4	3 493,5
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8 401,1	9 486,8	10 062,2	10 556,7	11 170,8	11 665,6
1.f. Hotel dan Restoran	1 059,6	1 019,0	1 156,8	1 250,6	1 341,3	1 427,2
1.g. Lainnya	881,4	905,6	1 227,3	1 333,8	1 377,5	1 399,6
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1 613,3	1 709,9	1 961,6	2 049,6	2 057,9	2 199,0
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	13 496,8	15 186,5	15 528,9	16 608,1	16 838,2	17 721,1
3.a. Konsumsi Kolektif	8 026,1	8 414,4	7 999,6	8 752,6	10 075,6	10 785,7
3.b. Konsumsi Individu	5 470,7	6 772,1	7 529,3	7 855,5	6 762,6	6 935,4
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	15 844,4	17 614,8	22 196,0	24 832,3	26 088,1	27 666,2
4.a. Bangunan	11 715,4	12 301,4	16 690,9	19 336,3	21 644,7	24 048,4
4.b. Non-Bangunan	4 128,9	5 313,5	5 505,1	5 496,0	4 443,4	3 617,7
5. Perubahan Inventori	2 795,4	979,3	794,5	673,5	297,7	356,2
6. Ekspor	4 579,9	4 708,9	5 347,4	10 490,5	5 746,0	5 742,5
7. Impor	27 168,9	28 489,4	33 829,8	42 262,4	37 511,1	39 266,5
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	48 863,2	51 505,2	54 108,0	56 770,8	59 705,3	62 788,1

^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2012 - 2017

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	77,7	77,2	74,0	74,7	73,3	73,2
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	35,0	32,8	30,3	31,2	32,6	32,6
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,4	3,4	3,2	3,6	3,4	3,4
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,8	13,8	13,7	13,1	11,6	11,6
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,3	5,4	5,5	5,3	5,3	5,3
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	16,3	17,8	17,3	16,7	15,4	14,9
1.f. Hotel dan Restoran	2,0	1,8	2,1	2,5	2,8	3,1
1.g. Lainnya	2,0	2,1	2,0	2,3	2,2	2,2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	3,0	3,1	3,4	3,3	3,1	3,2
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	29,1	27,9	28,5	29,0	29,0	29,8
3.a. Konsumsi Kolektif	17,0	16,7	16,0	15,7	17,7	17,7
3.b. Konsumsi Individu	12,0	11,2	12,4	13,4	11,3	12,1
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	33,2	33,6	38,9	40,7	42,6	42,4
4.a. Bangunan	24,8	23,8	29,3	31,7	34,0	35,6
4.b. Non-Bangunan	8,4	9,9	9,7	9,1	8,6	6,9
5. Perubahan Inventori	5,7	1,9	1,5	1,3	0,6	0,6
6. Ekspor	14,5	15,5	10,1	19,2	10,1	9,2
7. Impor	63,1	59,1	56,4	68,3	58,6	62,5
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2012 - 2017

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,1	5,6	5,8	5,4	4,1	4,7
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,4	1,1	1,0	5,9	5,2	5,7
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,9	4,3	8,2	7,1	3,0	5,0
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,9	8,6	7,7	4,7	(1,4)	2,9
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,3	7,4	15,4	3,0	6,3	5,4
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,7	12,9	6,1	4,9	5,8	4,4
1.f. Hotel dan Restoran	4,2	(3,8)	13,5	8,1	7,3	6,4
1.g. Lainnya	(10,6)	2,8	35,5	8,7	3,3	1,6
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	20,6	6,0	14,7	4,5	0,4	6,9
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	5,9	12,5	2,3	7,0	1,4	5,2
3.a. Konsumsi Kolektif	3,6	4,8	(4,9)	9,4	15,1	7,1
3.b. Konsumsi Individu	9,5	23,8	11,2	4,3	(13,9)	2,6
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	7,6	11,2	26,0	11,9	5,1	6,1
4.a. Bangunan	8,3	5,0	35,7	15,9	11,9	11,1
4.b. Non-Bangunan	5,7	28,7	3,6	(0,2)	(19,2)	(18,6)
5. Perubahan Inventori	(56,7)	(65,0)	(18,9)	(15,2)	(55,8)	19,6
6. Ekspor	21,1	2,8	13,6	96,2	(45,2)	(0,1)
7. Impor	13,6	4,9	18,8	24,9	(11,2)	4,7
PDRB	5,5	5,4	5,1	4,9	5,2	5,2

^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2012 - 2017**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	113,1	119,0	120,4	128,1	133,2	137,9
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	116,7	121,1	123,6	133,7	146,2	150,4
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	126,6	134,7	130,2	152,8	154,8	161,0
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	107,9	111,8	114,6	116,3	115,1	122,5
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	118,3	125,6	123,4	129,6	134,9	138,4
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	106,5	115,1	117,8	120,5	115,4	116,0
1.f. Hotel dan Restoran	103,0	109,4	122,9	153,4	176,2	196,8
1.g. Lainnya	124,1	145,2	114,0	129,6	136,3	146,0
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	102,1	109,3	118,5	123,9	128,1	132,8
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	118,2	112,5	125,5	133,0	144,6	153,5
3.a. Konsumsi Kolektif	116,6	121,7	137,3	136,2	147,4	149,8
3.b. Konsumsi Individu	120,7	101,0	113,0	129,5	140,4	159,2
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	115,1	117,1	120,1	124,8	136,9	139,8
4.a. Bangunan	116,2	118,5	120,1	124,6	131,8	134,9
4.b. Non-Bangunan	112,1	113,6	120,1	125,7	162,2	172,7
5. Perubahan Inventori	112,1	118,9	128,9	143,9	154,0	160,3
6. Ekspor	173,2	201,9	129,6	139,5	147,3	151,8
7. Impor	127,6	127,3	114,2	122,9	131,1	136,6
PDRB	112,3	119,1	126,6	134,1	140,6	145,2

^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016 ^x	2017 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,8	5,2	1,2	6,4	4,0	3,6
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,9	3,7	2,1	8,2	9,3	2,9
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,8	6,4	(3,4)	17,4	1,3	4,0
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,1	3,6	2,5	1,5	(1,0)	6,4
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,0	6,2	(1,7)	5,1	4,1	2,6
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,8	8,1	2,3	2,3	(4,2)	0,6
1.f. Hotel dan Restoran	0,8	6,3	12,4	24,8	14,9	11,7
1.g. Lainnya	15,0	17,0	(21,5)	13,6	5,2	7,1
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,5	7,0	8,4	4,6	3,4	3,7
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	8,1	(4,9)	11,6	6,00	8,7	6,1
3.a. Konsumsi Kolektif	6,3	4,4	12,8	(0,8)	8,2	1,6
3.b. Konsumsi Individu	10,9	(16,3)	11,8	14,6	8,5	13,4
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,8	1,7	2,6	3,9	9,7	2,1
4.a. Bangunan	4,2	2,1	1,3	3,7	5,8	2,4
4.b. Non-Bangunan	6,4	1,4	5,7	4,6	29,1	6,5
5. Perubahan Inventori	74,8	6,0	8,4	11,6	7,0	4,1
6. Ekspor	7,5	16,6	(35,8)	7,6	5,6	3,0
7. Impor	7,8	(0,2)	(10,3)	7,7	6,7	4,2
PDRB	6,6	6,0	6,3	5,9	4,9	3,3

^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

**Tabel 7. Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2012 - 2017**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016^x	2017^{xx}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,9	4,3	4,5	4,2	3,2	3,6
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,5	0,4	0,3	1,8	1,6	1,8
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,4	1,2	1,1	0,7	(0,2)	0,4
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,0	0,4	0,8	0,2	0,4	0,5
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,0	2,2	1,1	0,9	1,1	0,8
1.f. Hotel dan Restoran	0,1	(0,1)	0,3	0,2	0,2	0,1
1.g. Lainnya	(0,2)	0,1	0,6	0,2	0,1	0,0
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,6	0,2	0,5	0,2	0,0	0,2
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	1,8	3,5	0,7	2,0	0,4	1,5
3.a. Konsumsi Kolektif	0,8	0,8	(0,8)	1,4	2,3	1,2
3.b. Konsumsi Individu	1,1	2,7	1,5	0,6	(1,9)	0,3
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2,4	3,6	8,9	4,9	2,2	2,6
4.a. Bangunan	1,9	1,2	8,5	4,9	4,1	4,0
4.b. Non-Bangunan	0,5	2,4	0,4	(0,0)	(1,9)	(1,4)
5. Perubahan Inventori	2,2	(3,7)	(0,4)	(0,2)	(0,7)	(0,1)
6. Ekspor	1,7	0,3	1,2	9,5	(8,4)	(0,0)
7. Impor	7,0	2,7	10,4	15,6	(8,4)	2,9
PDRB	5,5	5,4	5,0	4,9	5,2	5,2

^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

Daftar Pustaka



<https://ntt.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. R. Suprpto No.5 Kupang 85111

Telp.: (0380) 826289, 821755 - Fax. (0380) 833124

Homepage: ntt.bps.go.id; E-mail: bps5300@bps.go.id

ISSN 2407-893X



9 772407 893004 >